



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KAMARUDIN**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **85445**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.230.000.000**

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KAYONG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA BOMBANA, Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BOMBANA, Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOMBANA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 158.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



4. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.574.046

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.502.924.046

III. HUTANG Rp. 84.100.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.418.824.046

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.